

# KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

**Jaka Hendrawan**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract:** This research describe about analyze policy of local budgeting capability in Kuantan Singingi Regency. Since implementated of regulations number 23 year of 2014 about local autonom, then local government are have a authority to manage and increase their growth and development in local government. In 2014 Indonesia government are create a cutting of oil and mineral budget and it gives impact for local government althought government of Kuantan Singingi Regency. The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research shows that analyze policy of local budgeting capabilities in Kuantan Singingi Regency are have done by intencification and extencivication policy, increase of local income resources and efficiency and rationalizations of locall budgeting in Kuantan Singingi Regency. In order that, some factors that cause the optimalizations of policy local budgeting capabilities are communication factors are minimis of coordination between implementators programs, resources factors are minimis of quantity and quality of human resources of staff government, implementator of policy behaviour likes reward for staff retributions and bureacratric structure likes locall tax managment retributions was not optimally that give impact for policy of local budgeting capability in Kuantan Singingi Regency.

**Abstrak:** Penelitian ini menggambarkan tentang analisis kebijakan kemampuan penganggaran daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Sejak diberlakukannya peraturan nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya di pemerintahan daerah. Pada 2014 pemerintah Indonesia menciptakan pemotongan anggaran minyak dan mineral dan memberi dampak bagi pemerintah daerah meskipun pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian menggunakan metode ini adalah metode kualitatif yang menganalisis masalah penelitian dengan menggambarkan kondisi subjek dan objek berdasarkan kenyataan. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan kemampuan penganggaran daerah di Kabupaten Kuantan Singingi telah dilakukan dengan kebijakan intencifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan sumber pendapatan dan efisiensi daerah dan rasionalisasi penganggaran daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu, beberapa faktor yang menyebabkan optimalisasi kebijakan pemberantasan anggaran daerah adalah faktor komunikasi yang minim dalam koorelasi antara program pelaksana, faktor sumber daya adalah minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pegawai pemerintah, pelaksana perilaku kebijakan seperti penghargaan atas retribusi pegawai. dan struktur birokrasi seperti retribusi pengelolaan pajak daerah tidak optimal yang memberikan dampak bagi kebijakan kemampuan penganggaran daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

**Kata Kunci:** analisis, kebijakan, anggaran, pemerintahan

## PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda (Dye, 1978). Kemudian Laswell juga memberikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktik-praktik tertentu. Easton secara singkat memberikan definisi kebijakan publik sebagai impact dari aktivitas pemerintah. Kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan.

Beragam batasan mengenai kebijakan publik diberikan oleh para ahli, meskipun tidak menyebutkan secara spesifik siapa pelaku kebijakan publik. Kebijakan publik sering diberi batasan sebagai hasil-hasil keputusan (*decision*) yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Derbyshire mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Dalam rangkaian proses kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang saling terkait

satu dengan yang lainnya. Perumusan atau formulasi kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik yaitu proses memastikan pokok isu dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan memperhatikan bahwa rumusan kebijakan akan menjadi hukum bagi elemen negara. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah cara yang dipilih oleh sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pada berikutnya, dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata-mata melihat kesenjangan antara tujuan dan pencapaiannya, namun melingkupi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan.

Efektivitas implementasi kebijakan publik akan terlihat dari dampak yang terjadi di masyarakat. Apabila dampak yang terjadi positif, dapat dikatakan implementasi kebijakan efektif, demikian juga sebaliknya apabila dampak yang terjadi adalah negatif atau tidak sesuai dengan harapan pemerintah berarti implementasi tidak efektif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori George Edward III mengenai implementasi kebijakan.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah antara tahun 2011-2016. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

Kerangka teori dibutuhkan untuk peneliti untuk menelaah permasalahan penelitian dengan lebih terperinci. Selain itu kerangka teori juga berguna bagi peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian dan menemukan hipotesis penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah teori kebijakan dan implementasi kebijakan. Menurut Anderson ada beberapa ciri dari kebijakan yaitu: 1) setiap kebijakan mesti ada tujuannya, 2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri dan terpisah dari kebijakan lain, 3) kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, 4) kebijakan didasarkan pada hukum.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan sebuah kajian pemerintahan yang menganalisis kebijakan peningkatan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011-2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diawali dengan menggambarkan hubungan antar variabel responden setelah itu dilanjutkan dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan pelaksanaan kebijakan peningkatan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan peningkatan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan beberapa cara yaitu observasi atau pengamatan, wawancara bersama informan penelitian dan kuesioner. Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnl, surat kabar, bulletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah**

Secara anggaran setiap tahunnya anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan sumber pendapatan terbesar berasal dari dana perimbangan pusat. Permasalahan kecilnya sumber pendapatan asli daerah yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana pendapatan asli daerah hanya menyumbang rata-rata dibawah 10% setiap tahunnya mengakibatkan daerah sangat tergantung dengan dana perimbangan dan dana bagi hasil. Beberapa bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat adalah

dengan beberapa langkah strategis berikut, yaitu: ***Kebijakan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah***

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah di Kabupaten Kuantan Singingi diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif terutama dalam proses perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan efisiensi perencanaan dan penggunaan anggaran dengan beberapa langkah berupa belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi, maka Pemerintah Kabupaten memfokuskan penggunaan anggaran belanja daerah dalam hal pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuansing, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

Dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*); Kebijakan untuk

belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kabupaten Kuansing. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Kuansing;
2. Kerjasama investasi antara Pemerintah Kabupaten Kuansing dengan pihak swasta atau dengan pihak *government*/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan;
5. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
6. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana

investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian, industri pengolahan dan industri manufaktur.

### ***Penambahan terhadap Sumber Pendapatan Daerah Lainnya***

Selain itu, bentuk kebijakan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah melakukan kebijakan diversifikasi sumber pendapatan daerah. Diversifikasi menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kuantan Singingi lebih banyak didominasi oleh sektor primer. Oleh karena itu, sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sektor primer dan mata rantainya.

Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Penggunaan anggaran untuk belanja barang dan jasa, berdasarkan pada patokan harga dasar yang telah ditetapkan dalam HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan).

### ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Kemampuan Keuangan Daerah***

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

melakukan beberapa terobosan kebijakan dalam menghadapi defisit anggaran dari dana perimbangan pemerintah pusat seperti kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi anggaran, kebijakan diversifikasi pendapatan asli daerah dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah. Akan tetapi potensi pendapatan asli daerah baik dari pajak dan retribusi daerah masih belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

#### ***Faktor Komunikasi Antar Pelaksana Kebijakan***

Sampai dengan saat ini peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan setiap tahunnya mengesahkan peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengesahan APBD Kabupaten dan pendataan dari sumber pemasukan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, besarnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah tentu saja sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatannya atau paling tidak meningkat dari tahun ke tahun.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif pajak dan retribusi daerah adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pelayanan jasa umum kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Besarnya tarif pajak dan retribusi jasa umum di Kabupaten Kuantan Singingi tentu saja disahkan melalui peraturan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

#### ***Faktor Sumber Daya***

Secara umum kebijakan pengelolaan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi anggaran serta efisiensi dalam penggunaan belanja pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu cara lain yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan meningkatkan penerimaan realisasi pendapatan asli daerah baik dari pajak dan retribusi daerah.

Sampai dengan saat ini terdapat 15 instansi Organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi sumber pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Sampai dengan saat ini permasalahan minimnya sumber daya potensi pemasukan dari sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi faktor pemicu defisit anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

### ***Faktor Disposisi atau Sikap***

Sikap atau keberatan dari wajib pajak dan retribusi terutama masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi untuk membayar pajak dan retribusi daerah tentu saja berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sisi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut beberapa wajib retribusi di Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Kuantan Singingi terkait pembayaran retribusi pasar sudah ada akan tetapi permasalahan kurangnya sosialisasi Bidang Pengelolaan Pasar terhadap Perda Retribusi Pasar yang berlaku baik kepada pegawai/petugas pasar maupun wajib retribusi. Kurangnya pengetahuan/wawasan petugas menjadikan mereka seperti robot dalam melakukan pekerjaannya diperberat lagi kualitas sumber daya manusianya juga kurang.

### ***Faktor Struktur Birokrasi***

Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang pajak dan retribusi daerah. Akan tetapi jika ditelaah peraturan daerah tersebut masih bersifat umum dan universal, sehingga diperlukan peraturan khusus. Seperti hal dalam kegiatan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Kuantan Singingi membuat beberapa item aturan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang retribusi daerah.

Hal ini dikarenakan di Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada Peraturan Daerah khusus yang mengatur tentang retribusi daerah untuk memudahkan proses pemungutan pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, mencermati dari uraian di atas maka dapat ditarik analisa bahwa peraturan menjadi salah satu kekuatan organisasi dalam menjalankan tugas karena merupakan rambu-rambu yang mengarahkan bagaimana tugas harus dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan tertib. Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka kerjasama kemitraan dengan instansi lain di organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kuantan Singingi sangat perlu dilakukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang mampu meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

### **SIMPULAN**

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan sumber pendapatan keuangan dilakukan dengan beberapa bentuk kebijakan strategis, yaitu kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah, penambahan alokasi sumber penerimaan pendapatan daerah serta efisiensi dan rasionalisasi dalam penggunaan anggaran belanja daerah oleh Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi. Akan tetapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan sumber pendapatan keuangan daerah masih belum optimal, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu: Faktor komunikasi berupa Minimnya Koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi serta sosialisasi yang minim oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada masyarakat dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Faktor sumber daya berupa minimnya jumlah sumber daya manusia pegawai dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kuantan Singingi, minimnya pengetahuan dan tingkat pendidikan dari petugas pemungut pajak dan retribusi

daerah di SKPD penerima sumber pendapatan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Faktor disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan berupa tidak adanya insentif tambahan kepada para petugas dilapangan sehingga penerimaan pendapatan daerah dari sumber pajak dan retribusi belum optimal dilakukan. Faktor struktur birokrasi berupa pengelolaan pajak daerah dan retribusi di Kabupaten Kuantan Singingi yang belum optimal sehingga hal ini berdampak terhadap kemampuan keuangan di daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Bambang Sunggono. 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Presindo.
- Deddy S Bratakusumah. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dede Mariana. 2006, *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*, Bandung: Truenorth.
- Dye, Thomas R, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ.
- Eddy Wibowo, 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. Yogyakarta. BPFE.
- Edward III, George C. 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London. England.
- Lexi J Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Mawarni, 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh)*. Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 11 Pages pp. 80- 90 Volume 2, No.2,.
- Miftah Toha. 1991. *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali.
- Rasyid Taha. *Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah*". Jurnal Ilmu Pemerintahan Unpar, Volume 1 Nomor 2 tahun 2014.
- Rian D Nugroho. 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta. Elekmedia Komputindo.
- SA Wahab. 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Samodra Wibawa. 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Jakarta. Intermedia.
- Suharsimi Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Sulistyaningsih. 1993. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Izufa Gempita.
- Talidziduhu Draha. 2000. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta. PT. Mutiara Sumber Widya.